

ARTIKEL
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK
MEWUJUDKAN KABUPATEN KARAWANG YANG ASRI DAN LESTARI
(STUDI KASUS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015)

Neng Sri Handayani

188010010



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2021

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan Dan Pemakaman Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan Dan Pemakaman Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015) dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang masih belum optimal dikarenakan

kebutuhan masyarakat Karawang yang belum sepenuhnya terpenuhi, masih terbatasnya lahan yang digunakan untuk pertamanan karena tidak semua lahan yang ada dapat dipakai pemerintah daerah untuk dijadikan ruang terbuka hijau, belum ada suatu program yang secara spesifik membahas untuk mengembangkan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan Kabupaten Karawang, dukungan dari sumber daya belum memadai, masih terdapat kekuasaan yang memegang kendali, lemahnya pengawasan, dan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Karawang

Saran dari peneliti masyarakat yang ada dapat berinisiatif melakukan pembangunan taman dari anggaran sukarelawan masyarakat setempat, dengan demikian maka bahu membahu untuk menciptakan kabupaten Karawang yang semakin asri. Membuat suatu komunitas yang didalamnya mau bahu-membahu melakukan pengelolaan terhadap taman yang ada di wilayah tersebut. dibentuknya Satuan Tugas Khusus (SATGASUS). Perlu adanya bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Perlu adanya pemberlakuan sanksi yang tegas bagi masyarakat

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

This research discusses "Implementation of Green Open Space Management Policies in the Field of Parks and Cemeteries in the Public Housing and Settlement Areas Office to Realize a Beautiful and Sustainable Karawang Regency (Case Study of Regional Regulation Number 2 of 2015)". This study aims to analyze the extent to which the implementation of green open space management policies in the field of parks and cemeteries in the Public Housing and Settlement Areas Office to Realize a Beautiful and Sustainable Karawang Regency (Case Study of Regional Regulation Number 2 of 2015) and the efforts made in providing green open space in Karawang Regency.

The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Interactive data analysis technique which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The validity of the data was tested by triangulation of sources.

The results show that the implementation of green open space management policies in Karawang Regency is still not optimal due to the needs of the Karawang community that have not been fully met, there is still limited land used for landscaping because not all existing land can be used by local governments to be used as green open spaces, there is no a program that specifically discusses developing green open space management in rural areas of Karawang Regency, support from resources is not

adequate, there is still power in control, weak supervision, and the level of community compliance in Karawang Regency is still weak

Suggestions from existing community researchers can took the initiative to build a park from the local community volunteer budget, thus working hand in hand to create a more beautiful Karawang district. Creating a community in which they want to work together to manage parks in the area. the formation of a Special Task Force (SATGASUS). There is a need for Corporate Social Responsibility (CSR) funding, There is a need for strict sanctions for the community

Keywords: Policy Implementation, Green Open Space

I. PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Karawang ternyata tidak hanya menggosur lahan pertanian yang selama ini menjadi lumbung padi nasional, namun pesatnya pembangunan industri di Karawang juga mengancam RTH yang selama ini juga keberadaannya sangat minim. Padahal keberadaan RTH sangat diperlukan di Karawang, ini merupakan penerapan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupten Karawang. Namun hingga saat ini RTH di Karawang masih sangat minim, yang ada di sana sini hanyalah pabrik/industri, mencari daerah sejuk di Karawang untuk bersantai samasekali tidak ada, semua area penuh sesak dengan industri dan pusat perbelanjaan. RTH harus mampu memberikan tampilan wajah Karawang dengan lebih indah. Keberadaan taman-taman interaksi di perkotaan, selain keindahan wajah kota, juga mampu berfungsi untuk pengurangan emisi gas buang karbon. Saat ini ditengah terik cuaca yang menyengat di Karawang, warga membutuhkan tempat untuk bersantai dan berteduh seperti ruang terbuka hijau (RTH) , namun masih sangat sulit mencari taman yang nyaman dan asri di Karawang ini.

Kabupaten Karawang dikenal dengan julukan sebagai lumbung padi nasional, hal ini dikarenakan Karawang menjadi salah satu produsen padi terbesar di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu kini Karawang menjadi kota industri dan sebagai tujuan utama penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri. Mengingat Karawang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penopang daerah industri Kota Bekasi yang sudah over limit dan tentunya ibukota Jakarta yang sudah penuh dengan gedung-gedung tinggi sebagai pusat pemerintahan. Maka dari itu pemerintah pusat mengalihkan sebagian kawasan industri di ibukota dialihkan ke daerah pinggiran penyangga ibukota terutama di Kabupaten Karawang.

Sehingga tidak mengherankan perkembangan di Kabupaten Karawang sangat pesat. Melihat lahan persawahan dari mulai wilayah perkotaan sampai pedesaan kini perlahan-lahan beralih fungsi menjadi industri, menjadi bangunan permanen seperti perumahan, kontrakan, ruko - ruko dan lain sebagainya hal ini sudah bukan

pemandangan yang sulit untuk ditemukan, jika terus menerus dilakukan pembangunan secara fisik tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis Karawang bukan tidak mungkin lagi maka lahan yang seharusnya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) malah habis untuk pembangunan infrastruktur, walaupun dengan pembangunan infrastruktur tentu memiliki kebermanfaatan namun jika dilakukan secara berlebihan tentu akan memiliki dampak negatif terhadap kondisi lingkungan, untuk itu perlu diimbangi dengan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang kondisi ekologis.

Pembangunan sarana dan infrastruktur fisik di Kabupaten Karawang yang sangat gencar seakan-akan tidak mengenal tempat mengakibatkan konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi lahan terbangun diprediksi menimbulkan fenomena Pulau Panas Perkotaan atau Urban Heat Island (UHI). Beberapa dampak UHI antara lain timbulnya permasalahan kesehatan serta turunnya tingkat kenyamanan, sehingga turut mempengaruhi produktivitas masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Karawang dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukannya upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di daerah.

Adanya ruang terbuka hijau (RTH) tentu memiliki kebermanfaatan diantaranya membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbondioksida sekaligus menyimpan air, fungsi ini cenderung menurun di daerah perkotaan yang memiliki tingkat polusi tinggi dan jauh dari kesan teduh. Selain manfaat ekologis, manfaat ruang terbuka hijau (RTH) lainnya antara lain sebagai tempat berinteraksi sosial, sarana pendidikan dan penelitian. Ruang terbuka hijau (RTH) juga bisa dimanfaatkan secara ekonomi sebagai tempat wisata alam atau ekowisata. Terakhir manfaat ruang terbuka hijau (RTH) sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan (estetika).

Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan Karawang tidak sebanding dengan jumlah fasilitas umum atau bahkan pribadi lainnya seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan yang ada. Sementara lahan kosong atau lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) masih tersedia, sehingga apabila lahan kosong ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang terbuka hijau (RTH) maka setidaknya perbandingan ruang terbuka hijau (RTH) dengan gedung bangunan yang ada di Karawang kemungkinan akan mampu mendekati angka ideal. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) juga harus menjadi fasilitas utama penyeimbang pembangunan kota dalam menanggulangi banjir, menyerap polutan, dan menyuplai oksigen. Taman atau RTH juga dapat di manfaatkan oleh para pejalan kaki, tempat berolahraga bahkan sebagai tempat melepas penat bagi karyawan yang melakukan aktivitasnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah mengatur bahwasannya Ruang Terbuka Hijau terbagi menjadi dua jenis, yaitu Ruang Terbuka Hijau Private dan Ruang Terbuka Hijau Publik, dimana masing masing RTH harus memenuhi standarisasi luasan minimal, untuk RTH private luasan minimalnya yaitu sebesar 10% sedangkan untuk RTH Publik luasan minimal sebesar 20%. Menurut analisis-analisis yang digunakan meliputi analisis penggunaan lahan, analisis kebutuhan RTH menurut luas wilayah dan jumlah penduduk serta analisis permukaan (*land surface temperature*). Hasil analisis menunjukkan bahwa luas RTH Kabupaten Karawang secara keseluruhan mencapai 134.375 ha yang terdiri dari 134.284 ha RTH private dan 91 ha RTH publik. Berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2031, kebutuhan RTH publik tahun 5.999 ha, sedangkan kebutuhan RTH berdasarkan 20% luas wilayah adalah sebesar 38.848 ha. Hasil identifikasi RTH eksisting dan analisis kebutuhan RTH menunjukkan bahwa RTH Kabupaten Karawang secara keseluruhan masih memenuhi standar minimal 30% luas wilayah, namun luas RTH publik masih di bawah standar minimal 20% luas wilayah.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi mengapa proses implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang itu sendiri, diantaranya indikator pertama yaitu kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan, dikarenakan wilayah Karawang luas sehingga yang terlihat adalah taman-taman di kota terlihat indah sedangkan taman-taman di wilayah pedesaan tidak sebanding dengan taman-taman di perkotaan. contohnya yaitu taman di Kecamatan Cikampek tidak sebagus dengan taman di Karawang Barat, alasannya tidak semua menginginkan adanya taman, salah satunya dikarenakan tidak mengetahui bagaimana cara pengajuan untuk proses pembuatan taman dan alasan lainnya dikarenakan inisiatif dari masyarakat yang lebih memilih membangun sendiri taman di wilayahnya dibandingkan menunggu pihak dinas turun tangan secara langsung dikarenakan apabila menunggu pihak dinas menangani secara langsung memerlukan prosedur yang tidak sebentar.

Kedua, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dimana dengan adanya kebijakan ini diharapkan kebutuhan lahan yang diperlukan untuk RTH di Kabupaten Karawang terpenuhi namun berdasarkan hasil wawancara karena ketersediaan lahan, tidak semua lahan yang ada dapat dipakai pemerintah daerah untuk dijadikan ruang terbuka hijau dikarenakan terkait dengan perizinan yang dapat dikatakan sulit untuk diperoleh, selain faktor ketersediaan lahan faktor lainnya adalah penyebaran RTH di Karawang belum menyentuh pada semua kecamatan di Kabupaten Karawang. Karena jika berpacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733 Tahun 2014 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang dimana adanya ketentuan umum yang harus dimiliki ruang terbuka hijau yakni minimal dalam satu kecamatan memiliki satu ruang terbuka hijau.

Ketiga, belum meratanya pembangunan ruang terbuka hijau di pedesaan dibandingkan dengan ruang terbuka hijau di perkotaan diperlukan suatu program yang dapat menunjang perkembangan pengelolaan ruang terbuka hijau namun kenyataannya belum ada suatu program yang secara spesifik membahas untuk mengembangkan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan Kabupaten Karawang.

Keempat, dukungan dari sumber daya belum memadai yaitu dimana anggaran belum dapat mencukupi pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan RTH, anggaran yang tersedia untuk perawatan RTH hanya ada sebanyak 2 Miliar, yang dimana dana tersebut diakui masih tidak cukup. Selain dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan masih terdapat kendala, dimana petugas untuk melakukan monitoring belum sebanding dengan keberadaan RTH yang telah dibangun hal ini mengakibatkan RTH yang dikelola tidak semuanya dapat terawasi. RTH yang sudah terbangun tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan karena dengan pengawasan maka akan lebih terkontrol bagaimana keadaan RTH tersebut, selain daripada itu untuk membantu proses pengelolaan RTH diperlukannya fasilitas penunjang yang amat penting yaitu mobil tanki air, dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Karawang mobil tanki yang dibutuhkan masih kurang, saat ini mobil tanki yang ada hanya ada 11 unit, yang dimana akibat kekurangan unit maka penyiraman tanaman dilakukan bergiliran sehingga beberapa lokasi baru dapat disiram pada siang hari.

Kelima, tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Karawang masih kurang hal ini tercermin dari masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan di taman yang mengakibatkan sampah ter cecer begitu saja misalnya banyak sampah sisa-sisa rokok, selain masalah masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah masalah lainnya yaitu fasilitas taman seperti permainan anak terdapat coretan dikarenakan kurangnya tanggungjawab masyarakat untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di taman tersebut. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN KARAWANG YANG ASRI DAN LESTARI (STUDI KASUS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015)”**

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di bidang pertamanan dan pemakaman di dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan kabupaten karawang yang asri dan lestari (studi kasus perda nomor 2 tahun 2015)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di bidang pertamanan dan pemakaman di dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang asri dan lestari (studi kasus perda nomor 2 tahun 2015)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di bidang pertamanan dan pemakaman di dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang asri dan lestari (studi kasus perda nomor 2 tahun 2015)
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di bidang pertamanan dan pemakaman di dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang asri dan lestari (studi kasus perda nomor 2 tahun 2015)

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang, serta upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang dapat tercapai.
2. Secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang, serta upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang dapat tercapai.

II KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dapat terlaksana serta dapat mengetahui apakah kebijakan yang dibuat tersebut memiliki kebermanfaatan atau justru sebaliknya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi

publik dimana, aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya di organisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni:

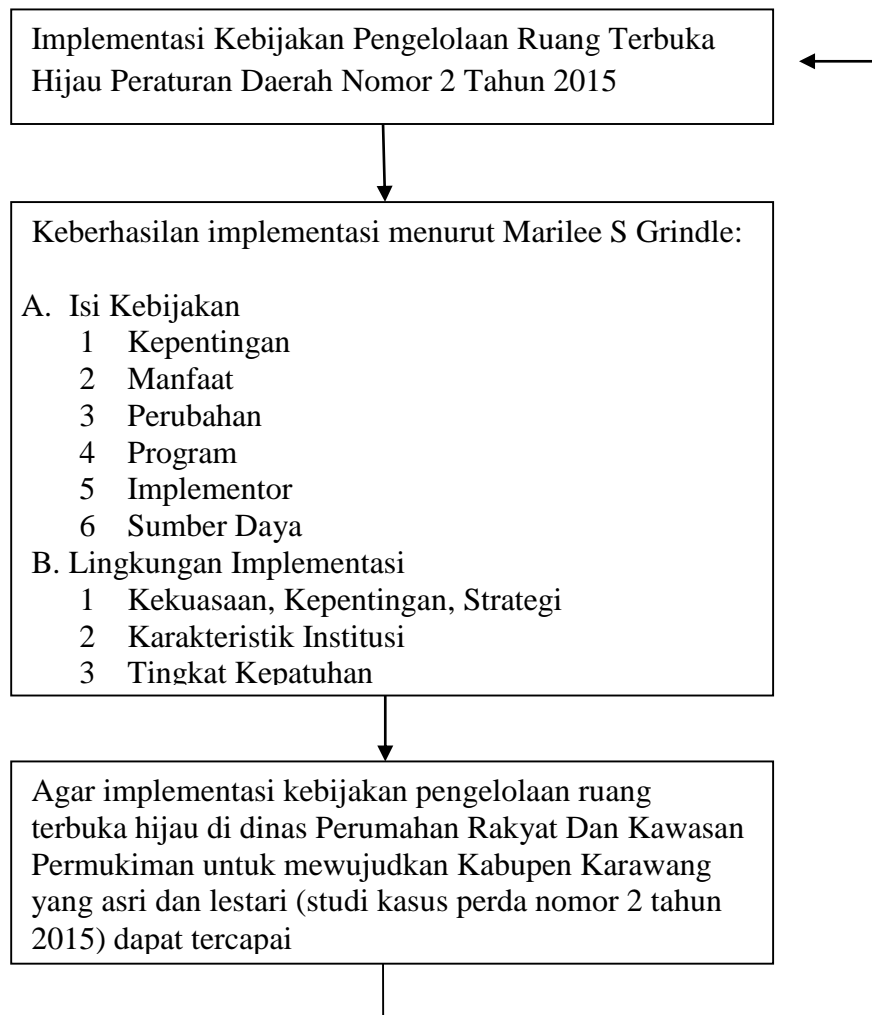
- a) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan sudah telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- b) Lingkungan implementasi (*content of implementation*) yang mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Isi Kebijakan (*content of policy*) yang mencakup:
 - (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam hal ini kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi. Oleh karena itu kebijakan diperlukan sebagai pengatur dalam berkehidupan di dalam lingkungan masyarakat.
 - (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan diciptakan salah satu tujuannya yaitu untuk memperbaiki keadaan di lingkungan masyarakat, jika suatu kebijakan yang sudah dibuat tidak memiliki kebermanfaatan terhadap masyarakat atau kelompok maka kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia.
 - (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan muncul di latar belakang karena adanya permasalahan, dengan adanya kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menciptakan perubahan, perubahan disini tentunya kebijakan yang mampu menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sebelum kebijakan dibuat bukan sebaliknya yaitu memicu permasalahan yang baru.
 - (4) Ketepatan dalam sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat sasaran agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

- (5) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak dapat dinilai keberhasilannya apabila tidak di implementasikan oleh implementor, karena peran implementor sangat penting, tanpa implementor maka kebijakan tidak akan berjalan. Implementor tidak hanya cukup satu melainkan terdiri dari beberapa implementor yang terlibat di dalamnya, dimana masing-masing implementor memiliki peran dan fungsinya yang berbeda namun dalam satu kesatuan
- (6) Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia (implementor) yang harus memadai dan tahu peran serta fungsinya seara baik agar tidak keliru, serta anggaran yang disediakan pun memadai, selain itu fasilitas yang ada harus mampu menunjang terlaksananya kebijakan.
- b) Lingkungan implementasi (*content of implementation*) yang mencakup:
 - (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya sehingga berdampak kepada kebijakan yang dibuat.
 - (2) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rezim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, intitusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat patuh terhadap kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.
 - (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan yang telah dibuat tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Berdasarkan teori di atas, maka kerangka beripikir peneliti disajikan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

Proposisi

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya disebabkan perubahan yang diharapkan belum tercapai dikarenakan ketersediaan lahan, belum meratanya pembangunan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang, dukungan sumber daya belum memadai tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang dapat dilaksanakan dengan baik bila memperhatikan Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang

diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan sudah telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Lingkungan implementasi (*content of implementation*) yang mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Subarsono (2011)

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang

Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kaabupaten Karawang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kbupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang dan untuk pelaksanaan operasional teknisnya oleh dikukuhkan oleh Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati terebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok sebagai berikut Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Pemilihan Informan

Berikut adalah daftar yang akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.5
Daftar Keyinforman

Keyinforman	Jabatan	Data yang akan di ambil
Informan 01	Seksi Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sebaran taman berdasarkan kecamatan di Kabupaten Karawang
Informan 02	Perencanaan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perencanaan taman di Kabupaten Karawang
Informan 03	Petugas Lapangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pendapat akan pemeliharaan RTH bagi masyarakat di Kabupaten Karawang
Informan 04	Masyarakat/ Pengunjung taman	Pendapat akan kebutuhan RTH bagi masyarakat di Kabupaten Karawang
Informan 05	Masyarakat/Pedagang	Pendapat akan kebutuhan RTH bagi masyarakat di Kabupaten Karawang

Operasional Parameter

Berikut ini adalah Operasional Parameter sebagai acuan peneliti dalam menyusun pedoman wawancara sehingga dapat berjalan dengan sistematis.

Tabel 3.6
Operational Parameter

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan dan Pemakaman Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015)	Isi Kebijakan (<i>content of policy</i>)	a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan	1
		b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group	2
		c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan	3
		d. Ketepatan dalam sebuah program	4
		e. Rincian implementor kebijakan	5
		f. Dukungan dari sumber daya yang memadai	6
	Lingkungan implementasi (<i>content of implementation</i>)	a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi	7
		b. Karakteristik institusi	8
		c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas	9

Sumber: Marilee S Grindle dalam Subarsono (2011:93)

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

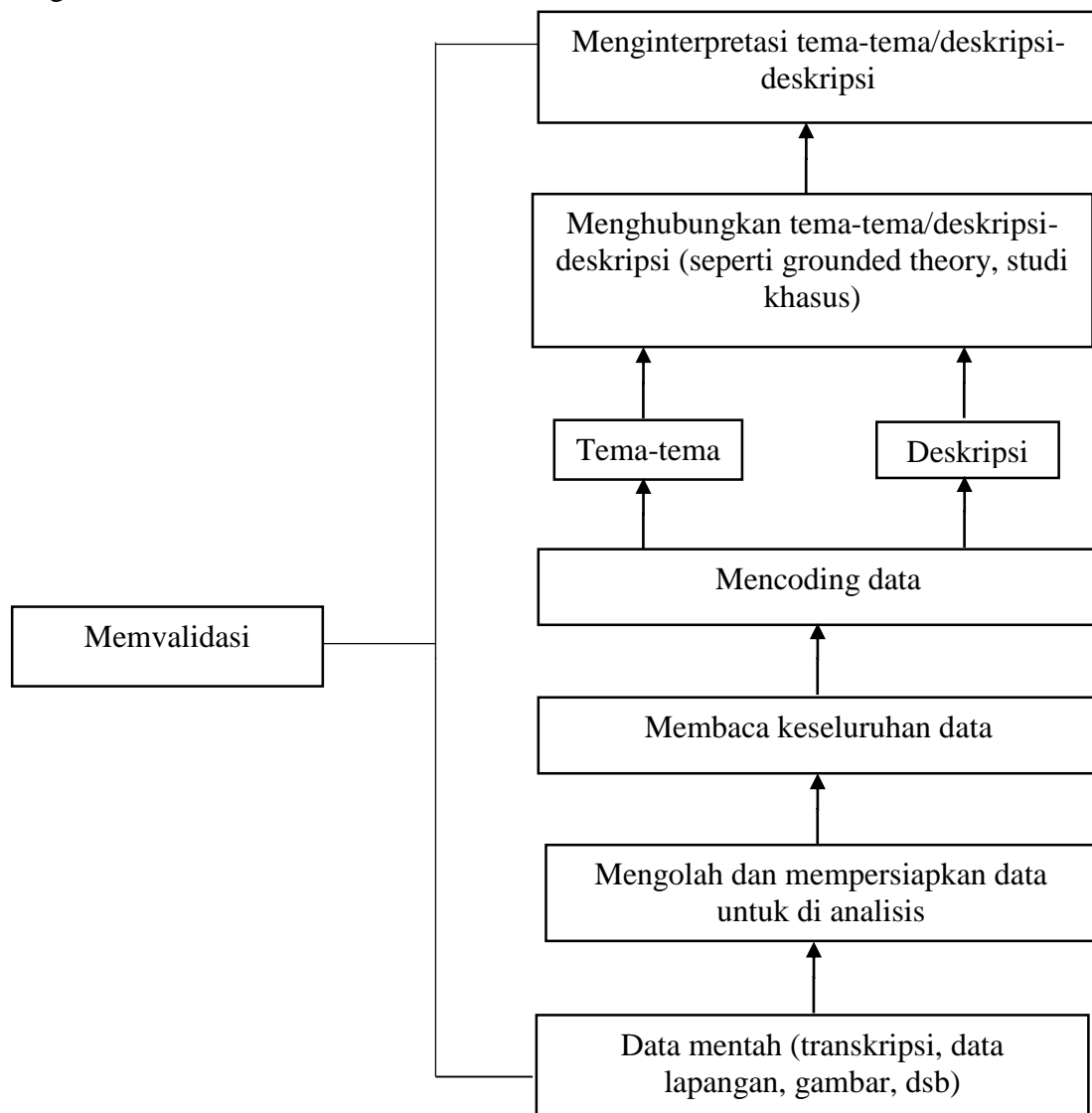
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang terdapat dalam objek penelitian pada saat penelitian berlangsung. Selain analisis data juga menggunakan teknik kategorisasi yaitu menyusun kategori

dari seperangkat temuan data disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar – benar merupakan variabel yang ingin diukur. **Cresswell dalam buku Research Design (2010)** mengungkapkan, bahwa salah satu metode keabsahan adalah triangulasi



Gambar 3.2 Triangulasi

Sumber: Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (2010) Hal 277

Ada 5 (lima) tipe triangulasi, yaitu:

- a Triangulasi teoritis
Triangulasi teoritis adalah menggunakan kerangka kerja atau perspektif teoritik dan hipotesis yang berbeda untuk studi yang sama, hipotesis dikembangkan dengan berbasis pada perspektif teori yang berbeda dan diuji dengan data yang sama.
- b Triangulasi data
Triangulasi data adalah melakukan pengumpulan data untuk membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari orang – orang, pada waktu yang berbeda, dan situasi yang berbeda pula.
- c Triangulasi metode
Triangulasi metode merupakan tipe paling umum dari triangulasi yang digunakan pada penelitian sosial.
- d Triangulasi investigator
Triangulasi investigator muncul ketika dua atau lebih investigator peneliti terlatih dengan beragam latar belakang mengeksplorasi fenomena yang sama.
- e Triangulasi analisis
Triangulasi analisis melibatkan penggunaan satu atau lebih teknik analisis untuk menganalisis seperangkat data yang sama untuk tujuan validasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dengan mengambil lokasi sebagai

objek penelitian yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang Jl Kertabumi No. 31 Kabupaten Karawang.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015)

1. Luasan Lahan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa memang sebaran RTH di Karawang masih terbatas, tidak hanya RTH publik namun RTH privat masih memiliki kendala yang dimana masyarakat masih abai akan pemanfaatan lahan yang ada dan memilih untuk menutup keseluruhan tanah dengan semen meskipun masih ada lahan kosong namun masyarakat tidak jarang mengabaikan lahan tersebut sehingga hanya tumbuh tanaman liar.

2. Kepentingan Kelompok Sasaran Atau Target Groups

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, memang taman yang ada di wilayah perkotaan lebih terpelihara di bandingkan dengan wilayah yang jauh dari perkotaan, taman yang ada di perkotaan Kabupaten Karawang lebih terjaga dari segi pemeliharaan tanamannya, bahkan terdapat tempat bermain untuk anak-anak, sedangkan taman yang berada di Cikampek yang memiliki jarak kurang lebih 30 km dari pusat kota, bahkan beberapa tanaman sudah tidak ada, dan tidak ada tempat bermain untuk anak-anak.

3. Manfaat yang Diterima Oleh Target Group

Berdasarkan hasil observasi, wawancara taman di Kabupaten Karawang ternyata masih belum maksimal menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan

4. Perubahan Yang Di Inginkan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara taman di Kabupaten Karawang ternyata sudah ada perubahan dalam hal pembangunan meskipun belum secara maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Karawang

5. Program

Berdasarkan hasil observasi, wawancara taman di Kabupaten Karawang ternyata sudah ada perubahan dalam hal pembangunan meskipun belum secara maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Karawang

6. Implementor

Berdasarkan hasil observasi, wawancara pada bidang pertamanan di Dinas PRKP, implementornya sudah jelas di sebutkan, akan tetapi peran terbesar sebagai pengambil keputusan yaitu ada pada Kepala Dinas

7. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, sumber daya yang ada untuk saat ini baik petugasnya itu sendiri, sarana dan prasarana serta anggaran memang belum mencukupi agar pemeliharaan taman di Kabupaten karawang dapat terpelihara secara maksimal

8. Kekuasaan, Kepentingan, Strategi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai kekuasaan, kepentingan dan strategi dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang maka dapat dikatakan kekuasaan masih menjadi alat guna mempermudah mendapatkan izin, tidak terdapat kepentingan tertentu dala pengelolaan RTH khususnya pertamanan di Kabupaten Karawang, serta seksi

pertamanan berupaya melakukan beberapa strategi untuk memaksimalkan pengelolaan pertamanan di Kabuapten Karawang.

9. Karakteristik Institusi

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara maka karakter institusi dalam pengelolaan RTH dalam hal ini pertamanan secara hierarki berjalan sebagaimana aturannya

10. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas dapat dikatakan memang kesadaran masyarakat masih rendah, dikarenakan belum bisa bekerjasama untuk saling menjaga RTH, terbukti dari masyarakat yang mencorat-coret fasilitas taman, sehingga merusak ke indahan taman yang sudah ter bangun, selain aksi mencorat-coret fasilitas taman masyarakat Karawang masih suka membuang sampah sembarangan di area pertamanan yang seharusnya bisa dijaga kebersihannya demi kenyamanan bersama, ternyata tidak hanya itu saja, taman yang seharusnya nyaman untuk dijadikan tempat berteduh, justru terganggu dikarenakan taman yang berada di fly over Cikampek dijadikan tempat untuk berjualan oleh pedagang.

Upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Bidang Pertamanan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang asri dan lestari (studi kasus perda nomor 2 tahun 2015)

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Grindle (1980) maka agar implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang dapat di implementasikan dengan baik maka perlu menjalankan variabel-variabel implementasi dari Grindle, diantaranya adalah:

a. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup:

(1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam hal ini implementasi kebijakan pengelolaan RTH khususnya mengenai taman perlu diperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang agar taman-taman yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang. Saat ini taman di Kabupaten Karawang lebih mengutamakan pada aspek estetika

(2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Dalam Implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang maka perlu memperhatikan apakah kebijakan yang dibuat akan menghasilkan manfaat atau justru sebaliknya.

(3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini implementasi kebijakan RTH harus menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi perubahan RTH di Kabupaten Karawang.

(4) Letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini agar implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan sebuah program yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi.

(5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang tidak mungkin dijalankan oleh satu implementor saja, perlu adanya implementor lainnya agar pembagian kerja dapat lebih maksimal

(6) Apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH dapat berjalan dengan maksimal maka perlu sumber daya yang menunjang implementasi kebijakan, yaitu diantaranya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang mencukupi.

b. Lingkungan implementasi (*content of implementation*) yang mencakup:

(1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini Kepala Seksi Pertamanan, perencanaan pertamanan, serta koordinator lapangan harus mampu bertindak tegas dalam mengimplemetasikan kebijakan pengelolaan RTH khususnya bidang pertamanan di Kabupaten Karawang

(2) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang khususnya pertamanan masih terjadi dimana pejabat suatu daerah yang memiliki kedekatan dengan atasan bidang pertamanan maka proses pembuatan taman di daerah tersebut akan di permudah, seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dalam implementasi kebijakan.

(3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang perlu meningkatkan semangat masyarakat dalam kepedulian menjaga RTH khususnya pertamanan agar taman yang sudah dibangun tetap terjaga

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Bidang Pertamanan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015) belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kebutuhan masyarakat Karawang yang belum sepenuhnya terpenuhi terlebih lagi masyarakat Karawang yang jauh dari perkotaan, dimana masyarakat belum bisa merasakan fungsi taman secara maksimal layaknya taman yang ada di wilayah perkotaan, serta RTH privat yang masih terabaikan oleh masyarakat Kabupaten Karawang, terlebih masyarakat yang ada di kawasan perkotaan.

Selain dari pada itu, perubahan yang diinginkan dari kebijakan pengelolaan RTH dalam hal ini pertamanan di Kabupaten Karawang masih belum menghasilkan perubahan yang maksimal hal ini dapat terlihat dari masih terbatasnya lahan yang digunakan untuk pertamanan karena tidak semua lahan yang ada dapat dipakai pemerintah daerah untuk dijadikan ruang terbuka hijau disebabkan terkait dengan perizinan yang dapat dikatakan sulit untuk diperoleh dikarenakan alasan anggaran.

Belum meratanya pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan yang jauh dari perkotaan dibandingkan dengan ruang terbuka hijau di perkotaan diperlukan suatu program yang dapat menunjang perkembangan pengelolaan ruang terbuka hijau namun kenyataannya belum ada suatu program yang secara spesifik membahas untuk mengembangkan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan Kabupaten Karawang.

RTH khususnya pertamanan dalam hal ini Dinas PRKP memiliki satu bidang yang membahawai mengenai pertamanan yaitu Bidang pertamanan, dimana dalam pelaksanaan penyediaan pertamanan di Kabupaten Karawang Bidang pertamanan memiliki petugas lapangan yang ditugaskan melakukan monitoring serta pemeliharaan terhadap pertamanan yang akan dan sudah terbangun, sehingga implementor dalam kebijakan ini sudah jelas.

Dukungan dari sumber daya belum memadai yaitu dimana anggaran belum dapat mencukupi pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan RTH, anggaran yang tersedia untuk perawatan RTH hanya ada sebanyak 2 Miliar, yang dimana dana tersbut diakui masih tidak cukup. Selain dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan masih terdapat kendala, dimana petugas untuk melakukan monitoring belum sebanding dengan keberadaan RTH yang telah dibangun hal ini mengakibatkan RTH yang dikelola tidak semuanya dapat terawasi. RTH yang sudah terbangun tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan karena dengan pengawasan maka akan lebih terkontrol bagaimana keadaan RTH tersebut.

Pembangunan RTH dalam hal ini pertamanan dalam prakteknya terdapat kekuasaan yang berperan untuk menentukan apakah taman di suatu wilayah di Kabupaten Karawang akan dibangun secepatnya atau justru di kesampingkan, contohnya yaitu apabila terdapat pengajuan pembuatan taman di wilayah Kabupaten Karawang maka akan lebih cepat untuk disetujui apabila kepala daerah dalam wilayah tersebut memiliki kedekatan dengan Kepala Dinas PRKP itu sendiri, namun jika kepala daerah dalam wilayah tersebut tidak memiliki faktor kedekatan dengan Kepala Dinas maka pengajuan proposal harus terus diajukan terus menerus untuk mendapatkan persetujuan.

Pengelolaan RTH khususnya dalam hal pertamanan juga memiliki beberapa aktor yang berperan untuk melaksanakan kebijakan, dimana dalam pengelolaan RTH ini selain staf bidang pertamanan itu sendiri yang bertugas ada juga aktor yang berperan sebagai pelaksana lapangan yang bertugas untuk melakukan monitoring serta petugas lapangan yang secara langsung mengerjakan pemeliharaan terhadap taman di Kabupaten Karawang. Dari adanya aktor yang memiliki tugasnya masing-masing, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan RTH khususnya pertamanan ini para aktor bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan RTH dapat berjalan secara sistematis.

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan RTH ini yang menjadi fokus adalah bagaimana memaksimalkan pengawasan, serta meningkatkan pemeliharaan taman yang sudah terbangun, agar taman yang sudah terbangun tetap bisa terjaga, dikarenakan taman yang sudah terbangun harus senantiasa dijaga agar tetap tumbuh dan terawat. Dalam hal implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang Dinas PRKP masih belum maksimal dalam strategi pengelolaan serta pemeliharaan RTH di Kabupaten Karawang khususnya pertamanan.

Penyediaan RTH di Kabupaten Karawang melibatkan institusi yang berbeda dimana PRKP beririsan dengan DLHK, namun dalam hal penyediaan RTH PRKP lebih berfokus terhadap pengelolaan pertamanan sedangkan untuk DLHK berfokus pada hutan Kota, suku dinas-dinas ini bekerjasama dengan institusi lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyediaan RTH.

Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Karawang masih kurang hal ini tercermin dari masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan di taman yang mengakibatkan sampah ter cecer begitu saja misalnya banyak sampah sisa-sisa rokok, pelastik minuman dan makanan, dan sedotan pelastik, selain masalah masyarakat yang belum tertib dalam membuang sampah masalah lainnya yaitu fasilitas taman seperti permainan anak terdapat coretan dikarenakan kurangnya tanggungjawab masyarakat untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di taman tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bidang Pertamanan dan Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di wilayah yang jauh dari kawasan perkotaan khususnya pertamanan, yaitu dengan membuat suatu komunitas yang didalamnya mau bahu-membahu melakukan pengelolaan terhadap taman yang ada di wilayah tersebut.
2. Masyarakat yang ada dapat berinisiatif melakukan pembangunan taman dari anggaran sukarelawan masyarakat setempat, dengan demikian maka bahu membahu untuk menciptakan kabupaten Karawang yang semakin asri.
3. Perlu adanya suatu program yang menghasilkan suatu perubahan agar pemeliharaan RTH khususnya pertamanan di kawasan yang jauh dari kota tetap dapat terpelihara dengan baik, misalnya seperti dibentuknya Satuan Tugas Khusus (SATGASUS)
4. Perlu adanya bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperoleh dari bantuan perusahaan swasta. Bantuan CSR ini diperlukan agar kekurangan anggaran dari pemerintah dapat tertutupi, sehingga taman-taman yang ada di Kabupaten Karawang tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah yang pada dasarnya anggaran tersebut terbatas. Selain dari pada anggaran, untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni petugas lapangan yang bertugas melakukan pemeliharaan taman di Kabupaten Karawang maka setidaknya perlu diadakannya pelatihan agar kemampuan petugas lapangan semakin membaik.
5. Perlu adanya pemberlakuan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas taman, seperti sanksi denda ataupun sanksi sosial seperti melakukan pembersihan kawasan taman serta memperbaiki kembali fasilitas yang telah dirusak. Sanksi diberikan agar masyarakat yang melakukan pelanggaran dapat menerima efek jera sehingga kedepannya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- George, J. M., Gareth R. Jones. 1999. 2nd edition. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. USA. Addison – Wesley Publishing Company.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hutomo. 1999. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustopadidjaja. 1922. *Studi Kebijaksanaan*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito. 2003. *Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyudi, Isa., Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility Prinsip Pengaturan dan Implementasi*. Malang: In-TRANS Publishing
- Wibawa, Samodra. 1944. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

- Widodo, Jokowi. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zenzu, Nandang Saefudin. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Dalam Perspektif Idealitas Domestik*. Surabaya: KITA Press.